



Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Henny A. Manafe¹, Simon Sia Niha², Dewa Putu S. Putra³

¹ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: hennyunwira@gmail.com

² Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: ss.mukin11@gmail.com

³ Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: putu.distamben@gmail.com

Korespondensi Penulis: Dewa Putu S. Putra

Abstract: *Writing previous and appropriate scientific papers has an important role for writing subsequent scientific papers, especially regarding the influence of each variable or other variables. This scientific paper reviews the subject of a literature study on factors that affect local government financial performance, namely the size of local government, leverage, and balance funds. This scientific work is written by researchers so that they can determine hypotheses in determining hypotheses that result in variables so that they are useful for subsequent writing. The results obtained, such as: 1) The size of the local government has a positive and quite important impact on the financial performance of the local government; 2) Leverage has a positive and significant impact on the financial performance of local governments; 3) Balancing funds have a positive and significant impact on the financial performance of local governments; 4) The size of the local government, leverage, and balance funds have a positive and crucial effect simultaneously on the financial performance of the local government.*

Keywords: *Regional Government Financial Performance, Regional Government Size, Leverage, Balance Fund*

Abstrak: Penulisan karya ilmiah sebelumnya dan yang sesuai memiliki peranan penting untuk penulisan karya ilmiah berikutnya, terkhusus perihal pengaruh tiap variabel atau variabel lainnya. Karya ilmiah ini mengulas perihal suatu kajian pustaka faktor yang berakibat ke kinerja keuangan pemerintah daerah, yakni ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan. Karya ilmiah ini peneliti tulis agar bisa menentukan hipotesis dalam menentukan hipotesis yang berakibat ke variabel supaya bermanfaat bagi penulisan berikutnya. Hasil yang didapat, seperti: 1) Ukuran pemerintah daerah berakibat positif dan cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 2) Leverage berakibat positif dan

cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 3) Dana perimbangan berakibat positif dan cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 4) Ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan

PENDAHULUAN

Wewenang otonomi mengharuskan pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan layanan maupun kemakmuran masyarakat dengan menerapkan prinsip keadilan, demokratis, merata maupun berkelanjutan. Otonomi daerah merancang perimbangan finansial pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengubah aturan hubungan pusat dan daerah. Otonomi daerah pun dianggap sebagai upaya strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah dengan otonomi daerah yang mandiri bisa melaksanakan pembangunan seefektif atau seefisien (Sumarjo, 2010). Pada penerapannya, otonomi daerah tidak selancar yang diinginkan.

Selama rentang tahun terakhir, masalah hukum mengenai penyelenggaraan kinerja keuangan daerah menjadi sorotan. Ada beragam aturan keuangan yang terbit tidak disertai oleh kinerja yang meningkat. Perihal ini dibuktikan melalui permasalahan yang ditangani oleh pemerintah daerah, seperti tindakan penyimpangan hingga ketidakjelasan dalam mengungkap tata kelola keuangan (Kusumawardani, 2012).

Penilaian kinerja bisa merepresentasikan kinerja pemerintah daerah, terutama melalui penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan ialah kajian guna mencari tahu seberapa jauh entitas sudah menjalankan tujuan mereka melalui pemanfaatan peraturan penyelenggaraan keuangan (Fahmi, 2012). Kinerja keuangan menjadi penilaian yang bisa dipergunakan dalam memperjelas kapabilitas daerah menjalankan peraturan keuangan secara efektif ataupun efisien demi memberi layanan terbaik. Pengukuran yang lebih tinggi dijadikan keharusan agar bisa terpenuhi supaya pihak eksternal menentukan untuk menanamkan modalnya ke suatu daerah. Penilaian kinerja dari informasi keuangan ditentukan sesuai anggaran yang dirancang (Mardiasmo, 2009). Kinerja keuangan pemerintah dijadikan sesuatu yang berperan vital bagi pemerintah daerah maupun pihak eksternal.

Berlandaskan ke pemaparan itu, peneliti bisa merumuskan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini, terdiri atas:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah, memengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah leverage memengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah dana perimbangan memengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah, leverage dan dana perimbangan memengaruhi positif maupun krusial secara serempak bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?

METODE

Karya ilmiah ini memanfaatkan metode kualitatif ataupun kajian pustaka untuk mengkaji teori maupun hubungan masing-masing variabel. Dalam mengkaji teori dan hubungan variabel itu, peneliti memanfaatkan referensi yang didapat secara offline ataupun online. Melalui metode kualitatif ini, harus memanfaatkan kajian pustaka secara konsisten dengan hipotesis metodologis (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran Pemerintah Daerah Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menjadi variabel besar atau kecil suatu wilayah yang bisa terukur mempergunakan jumlah keseluruhan aktiva, jumlah karyawan, total penghasilan maupun tingkat produktivitas (Damanpour, 1991). Pemerintah daerah berukuran besar akan terdapat tekanan besar dalam mengungkap kinerja keuangannya. Atas dasar itulah, pemerintah daerah berukuran besar diharuskan untuk berkinerja lebih baik dibanding pemerintah daerah berukuran lebih kecil. Melalui risetnya, Lesmana (2010), Sumarjo (2010), Yulianingtyas (2011), dan Syafitri (2012) mempergunakan ukuran pemerintah daerah yang mereka produksikan menggunakan total aset. Ukuran pemerintah yang besar bisa memberi akses yang mudah untuk aktivitas operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Kemudahan di sektor operasional pun bisa melancarkan upaya untuk mendapat PAD demi memajukan daerah sebagai pembuktian atas kinerja yang meningkat (Kusumawardani, 2012). Perihal itu sama seperti riset Sumarjo (2010), menyebut bila kian besar ukuran pemerintah daerah, berarti kinerja keuangannya pun kian membaik.

Ukuran pemerintah daerah berdampak positif ataupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti riset yang dilaksanakan Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020); Retnowati, R. (2016), memperjelas bila ukuran pemerintah daerah berakibat cukup penting ke kinerja keuangan pemerintah daerah.

Leverage Berakibat ke Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada akuntansi sektor publik, *leverage* ialah rasio untuk menentukan besar kecil suatu daerah bergantung ke kreditur dalam mendanai aset daerah mereka. Daerah dengan *leverage* tinggi, maka mereka cenderung memiliki kebergantungan ke pinjaman luar dalam mendanai aset. Hitungan rasio *leverage* bagi pemerintah berperan vital bagi kreditur maupun calon kreditur selama menentukan keputusan dalam memberikan kredit. Rasio ini hendak dipergunakan kreditur untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utang mereka (Sumarjo, 2010). *Debt to equity ratio* (DER) atau rasio utang kepada modal berguna sebagai pengukur besar kecil aset milik daerah yang dibebani oleh utang dengan melakukan perbandingan total utang terhadap jumlah keseluruhan aktiva daerah. Hasil yang diperoleh akan kreditur gunakan untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah selama membayarkan utang mereka. rasio ini memberi indikasi besar kecil utang yang membebani pemerintah daerah itu (Sumarjo, 2010). Kian tingginya *leverage*, tentu bisa disebut kinerja keuangan daerah kian memburuj. Dengan begitu, daerah itu belum bisa mendanai operasional mereka sehingga masih memerlukan pinjaman dari pihak lain. Sumarjo (2010) mengkaji *leverage* dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Riset memperjelas bilamana *leverage* berakibat ke kinerja keuangan pemerintah daerah.

Leverage berakibat positif ataupun penting bagi kinerja keuangan daerah, seperti riset yang dilaksanakan Martantri, N. (2019); dan Wafa, M., & Trisnawati, R. (2018).

Dana Perimbangan Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah menjadi representasi dalam mencapai penyelenggaraan aktivitas kerja pemerintah daerah selama menerapkan tujuan, visi ataupun misi daerah yang ditentukan melalui aspek finansial yang terlihat dari laporan keuangan yang sudah tersusun oleh pemerintah daerah itu. Dana perimbangan, yaitu dana yang didapat melalui APBN yang teralokasikan ke daerah guna membiayai kebutuhan daerah demi melaksanakan (Undang-Undang No 33 Tahun 2004). Dana perimbangan itu dikenal sebagai transfer yang pemerintah pusat lakukan untuk menunjang pembiayaan program otonomi. Dana perimbangan bermaksud guna memberi bantuan bagi daerah terkait pendanaan wewenang dan

meminimalkan ketimpangan sumber pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk meminimalkan kesenjangan pembiayaan pemerintah antardaerah. Dana perimbangan pun diarahkan demi mencapai standar layanan di masing-masing wilayah.

Kondisi ini memperjelas bila kian besarnya dana perimbangan yang didapat bisa menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi itu diakibatkan oleh kian besarnya dana perimbangan yang didapat pemerintah daerah, tentu bakal menunjukkan bila pemerintah daerah memiliki kebergantungan ke pemerintah pusat/provinsi dalam memenuhi kebutuhan daerah. Ulasan ini sama seperti riset milik Putri dan Darmayanti (2019), memperjelas bila dana perimbangan berakibat buruk dan cukup penting bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Lain dengan riset itu, Sari (2016) berpendapat bila dana perimbangan berakibat cukup penting bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan berpengaruh positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah, seperti riset Rukmana, W. V. (2013); dan Verawaty, Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, and Nurhidayah Nurhidayah.

Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, dan Dana Perimbangan Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menjadi pihak yang melaksanakan sektor ekonomi, pembangunan, dan layanan masyarakat secara terbuka dan atas pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan demi menciptakan pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). Sesuai UU Nomor 23, memperjelas jika pemerintah daerah ialah kepala daerah yang akan menyelenggarakan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai wewenang daerah otonom. Kinerja keuangan pemerintah daerah, yakni tingkat perolehan capaian kerja di sektor keuangan daerah, terdiri atas perolehan dan belanja daerah memanfaatkan sistem keuangan sesuai kebijakan atau aturan undang-undang selama periode anggaran.

Ukuran pemerintahan daerah berakibat positif kepada kinerja keuangan daerah, yang memperjelas bila kian membesarkan aset daerah, tentu bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah. Banyak sedikit aset memperlihatkan daerah itu dapat mengatur wilayahnya secara optimal dengan aset yang dimilikinya. Aset itu bisa dijadikan dasar dan penilaian atas tingkat kemakmuran suatu wilayah. Dengan begitu, pemerintah bisa mewujudkan program melalui penyediaan layanan optimal bagi masyarakat. Seperti riset Kusumawardani (2012), mempertegas ukuran pemerintah daerah berakibat positif kepada kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Rasio *leverage* ialah penilaian banyak/besar atau sedikit/kecilnya jumlah total modal guna membiayai seluruh kebutuhan pemerintah dalam menjalankan otonominya, yang disesuaikan dengan nominal utang yang dimiliki. Kian tingginya persentase *leverage*, tentu kinerja keuangan pemerintah daerah kian memburuk. *Leverage* ialah seberapa besar aset yang didanai oleh pinjaman sebab daerah kesulitan dalam mendanai urisan daerah menggunakan modal pribadi. Sumarjo (2010) dalam Kusumawardani (2012) memperjelas bila kian besarnya *leverage*, tentu kinerja suatu entitas kian memburuk.

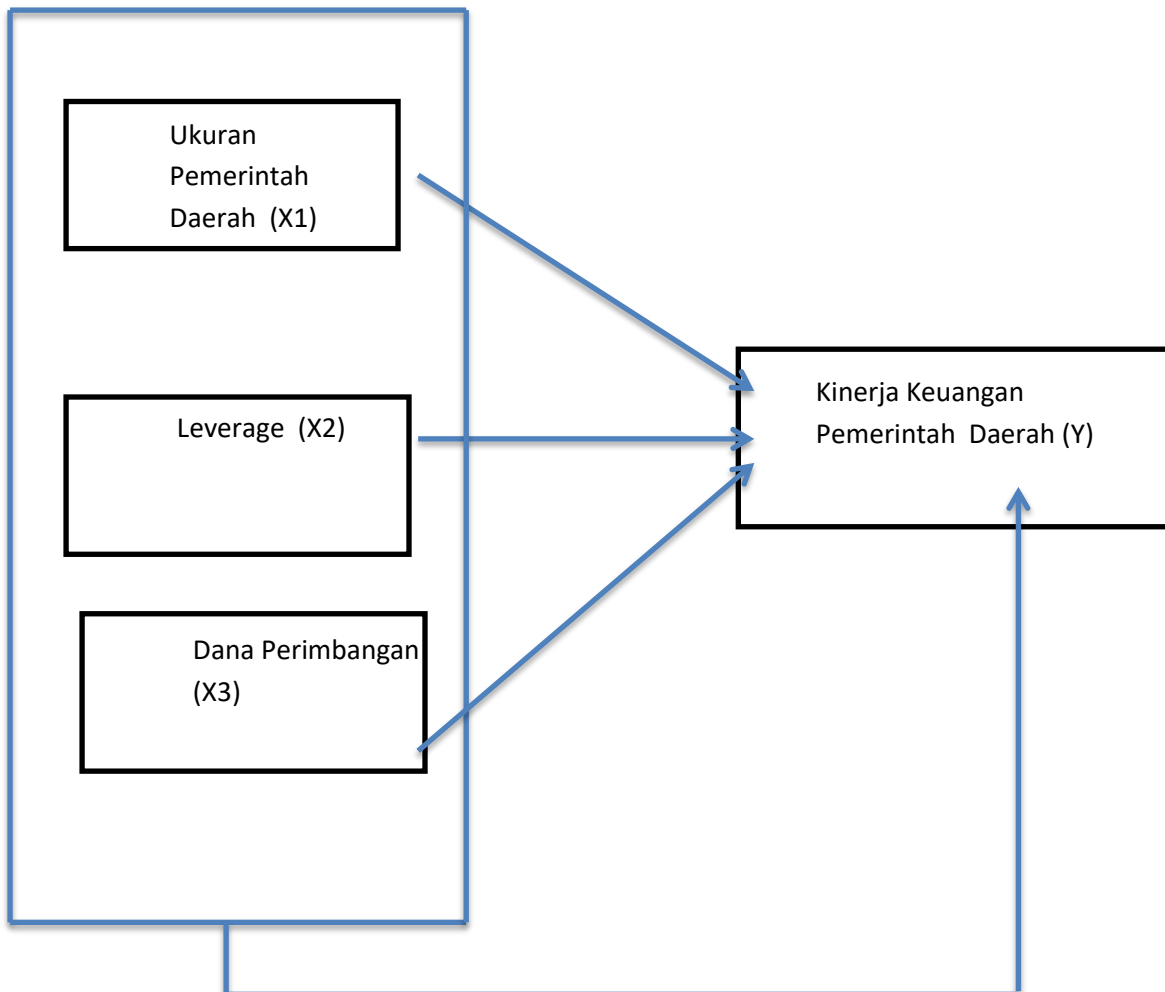
Dana perimbangan, yaitu dana yang didapat melalui APBN yang teralokasikan ke daerah guna membiayai kebutuhan daerah demi melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Sari (2016) berpendapat jika dana perimbangan berakibat positif dan penting kepada kinerja keuangan pemerintahan daerah. Beracuan ke UU Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan ialah dana dari APBN yang teralokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah. Bila perwujudan belanja daerah di atas penghasilan, tentu daerah akan menderita defisi. Sebab itulah, demi menutupi kekurangan belanja daerah, pemerintah pusat memberikan dana berbentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu akan masuk ke pendapatan daerah demi

memaksimalkan penerimaan daerah sehingga bisa memaksimalkan pula kinerja keuangan daerah.

Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan berakibat positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sama halnya riset Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016); dan Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022) yang memperjelas bila secara simultan ukuran pemerintah daerah, *leverage*, serta dana perimbangan berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Beracuan ke pemaparan di atas, peneliti memperoleh kerangka berpikir, yang terdiri atas:



Berdasar gambar di atas, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan berakibat bagi kinerja keuangan pemerintah daerah secara terpisah atau serempak. Selain variabel ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan dana perimbangan yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, masih terdapat variabel yang turut memengaruhinya, seperti: efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah (X4), PAD (X5), sistem akuntansi keuangan daerah (X6)

KESIMPULAN

Beracuan ke pemaparan di atas, peneliti bisa merumuskan hipotesis, terdiri atas:

1. Ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Leverage berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Dana perimbangan berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah jawa timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(3).
- Aulia, r., & rahmawaty, r. (2020). Pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh. *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi*, 5(4), 584-598.
- Darmanto, H. C. (2012). Pengaruh Population, Employment, Size dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kemandirian daerah (studi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2007 di wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(1), 29-51.
- Martantri, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017).
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Novyandra, R. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Leverage, Size dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- PUSPITA_AYU, PUTRI. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80-96.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834-2861.
- Retnowati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, <http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/2013/08/jurnal-WAN-VIDIRUKMANA-090462201374-Akuntansi-2013.pdf>. (Diakses pada tanggal 8 Juli 2014).
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra)* (Doctoral dissertation, Riau

- University).
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
- Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 9-21.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting analysis journal*, 1(1).
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91-113
- Verawaty, Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, and Nurhidayah Nurhidayah. "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan." *Mbia* 19, no. 1 (2020): 21-37.
- Wafa, M., & Trisnawati, R. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).